

Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah untuk Pembangunan Negara

Fitrianto

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia. E-mail: fitrianto88@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Sukuk, Investments, Development, Infrastructure.

Cara Sitasi:

Fitrianto "Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah untuk Pembangunan Negara." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (2019): 71-87.

ABSTRACT

This article describes the contribution of sukuk to development in Indonesia. Sukuk are bonds based on sharia principles. Retail Sukuk is a sharia investment product offered by the government to individual Indonesian citizens, as an investment instrument that is safe, easy, affordable and profitable. Sukuk has a very important contribution in infrastructure development in Indonesia. The research method is literature review by using books, articles, internet and opinions from experts in related fields. The accumulation of SBSN issuance up to February 27, 2019 reached Rp. 1,044.71 T, while the accumulation of 2013 - 2019 Project Financing Sukuk reached Rp. 90.79 T. For more than a decade SBSN has become one of the important financing and Islamic investment instruments in development in Indonesia.

Artikel ini menjelaskan kontribusi sukuk terhadap pembangunan di Indonesia. Sukuk adalah obligasi berdasarkan prinsip syariah. Sukuk Ritel adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Sukuk memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Metode penelitian adalah kajian pustaka yaitu dengan menggunakan buku, artikel, internet dan pendapat dari ahli dalam bidang terkait. Akumulasi penerbitan SBSN sampai dengan 27 Februari 2019 mencapai Rp. 1.044,71 T, sedangkan akumulasi Project Financing Sukuk 2013 – 2019 mencapai Rp. 90,79 T. Selama lebih dari satu dekade SBSN telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan dan investasi syariah yang penting dalam pembangunan di Indonesia.

1. Pendahuluan

Keuangan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia.¹ Namun demikian, perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara – negara lain. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar (*market share*) keuangan syariah yang secara keseluruhan masih di bawah 5%.²

¹ Otoritas Jasa Keuangan (2017). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia 2017 – 2019*. Diakses pada 3 April 2019.

² Ibid

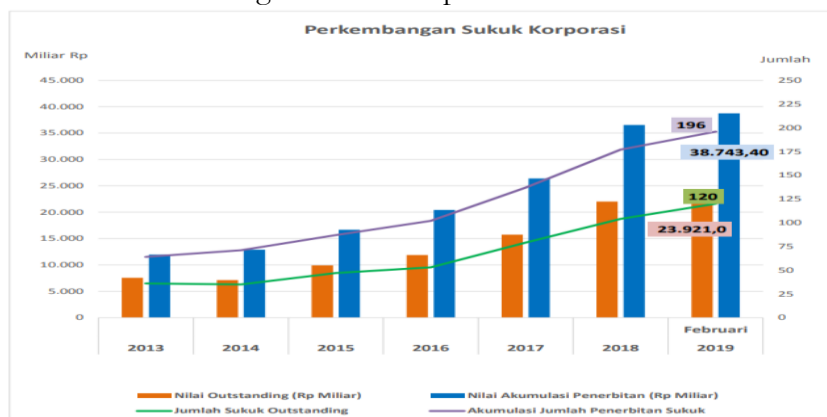
Sukuk merupakan salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Dapat disimpulkan bahwa, sukuk merupakan alternatif sumber pendanaan, terutama bagi pemerintah dan perusahaan korporasi (Ayub, 2007: 389).³

Pertumbuhan sukuk sangat meningkat tajam dibandingkan dengan instrumen keuangan Islam lainnya, pertumbuhan tersebut mencapai 84% pertahun jika dianalisis semenjak tahun 2001 s/d 2007. Sukuk terbanyak yang diterbitkan adalah di wilayah Timur Tengah dan Malaysia. Hampir 70% sukuk utama global berasal dari Malaysia (Shahnamugan dan Zahari, 2009: 51).⁴

Perkembangan sukuk negara di Indonesia dimulai pertama kali pada awal tahun 2009 dengan diterbitkannya Sukuk Negara Ritel 001 (SR 001) oleh Kemeterian Keuangan RI. Sukuk Ritel adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.⁵ Seri terakhir adalah SR 011 yang ditawarkan pada awal Maret 2019. Sukuk merupakan sertifikat kepemilikan aset yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan negara.

Sukuk negara mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan sukuk negara berbasis proyek untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri dan peningkatan investasi pemerintah.⁶ Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berhutang karena antara lain mengandung unsur kerjasama investasi, berbagi risiko, dan keterlibatan aset (proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk.⁷

Tabel 1. Perkembangan Sukuk Korporasi 2013 – Feb 2019



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

³ muhammad ayub, *Understanding Islamic Finance* (London: Wiley, 2007), 389.

⁴ Shahnamugan Zahari, *A Primer on Islamic Finance* (Malaysia: IBFIM, 2009), 51.

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019). *Mengenal Sukuk Ritel*. Diakses pada 3 April 2019.

⁶ Dahlan Slamet (2011). *Percepat Pembangunan Infrastruktur, Kemenkeu Terbitkan Sukuk Proyek*. PHEI. Diakses pada 3 April 2019

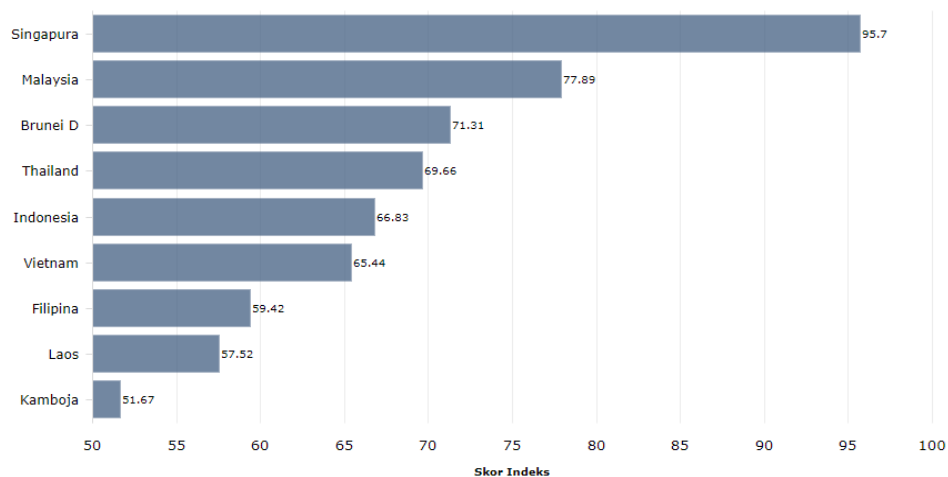
⁷ Rifki Ismail dan Khairunniasa Musari (2009). *Menggagas Sukuk Sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter*. Bisnis Indonesia. 1 April 2009.

Perkembangan pasar keuangan syariah antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya total akumulasi penerbitan Sukuk Korporasi. Sebelumnya total akumulasi Sukuk Korporasi tercatat Rp 20,4 triliun pada tahun 2016, dan menjadi Rp 35,6 triliun pada Oktober 2018.⁸ Infrastruktur yang layak dan mencukupi sangat berperan penting dalam kemajuan perekonomian di suatu wilayah. Identifikasi terhadap program pembangunan infrastruktur di beberapa negara menyimpulkan bahwa pada umumnya program ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan dan bandara).⁹

Pembangunan infrastruktur di Indonesia sepertinya masih jauh tertinggal dari negara – negara di kawasan ASEAN di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Dalam laporan *The Global Competitiveness Report 2018*, skor infrastruktur di Indonesia berada di level 66,8 dari skala 00 – 100. Ini menempatkan Indonesia di posisi ke 71 dari 140 negara yang disurvei.

Tabel 2. Skor Daya Saing Infrastruktur Negara-Negara Asia Tenggara 2018

Skor Daya Saing Infrastruktur Negara-Negara Asia Tenggara (2018)



Sumber: WEF, *The Global Competitiveness Report 2018*.¹⁰

Gambar di atas menjelaskan, meskipun peringkat pembangunan infrastruktur di Indonesia masih berada di posisi 5 untuk kawasan ASEAN, setidaknya perlu mengapresiasi usaha pemerintah dalam meningkatkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Pembangunan yang merata tersebut setidaknya dapat dilihat dari pembangunan tol trans Jawa dan trans Sumatra, pembangunan bandara dan pelabuhan (baik baru maupun renovasi) dan pembangunan fasilitas publik lainnya.

⁸ Amri Amrullah dan Friska Yolanda (2018). *Kontribusi Syariah untuk Pembangunan Nasional Digenjot*. Republika. 11 Desember 2018.

⁹ World Bank dalam Muryaningsih, Novi dkk (2014). *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Peneliti ekonomi di BRE DKM, Bank Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol 17 No 1.

¹⁰ World Economic Forum (WEF). <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI4.A.02>

Pembangunan nasional memerlukan dukungan dari berbagai aspek, termasuk dukungan dari ekonomi dan keuangan syariah yaitu melalui pembiayaan dan pasar keuangan syariah. Salah satu sumber dalam pembiayaan pembangunan nasional bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dan Sukuk Korporasi.¹¹ Sehingga, sukuk saat ini telah menjadi salah satu instrumen penting bagi negara untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Melihat peran pentingnya sukuk sebagai salah satu instrumen pembangunan infrastruktur negara, dapat dijadikan dasar bagi penulis untuk mencoba membahas manfaat sukuk sebagai salah satu instrumen dalam pembangunan negara, khususnya dalam pembangunan proyek infrastruktur.

2. Penelitian Terdahulu

Menurut Irfan Syauqi Beik (2011), menyatakan bahwa peran sukuk dalam pembangunan adalah sebagai alat untuk meringankan budget defisit APBN, mampu digunakan untuk pembangunan sektor riil, serta meningkatkan pangsa pasar dari instrumen obligasi syariah.¹²

Orientasi SBSN menurut Irfan Syauqi Beik adalah untuk sektor padat karya, optimalisasi potensi daerah, pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, energi dan lain-lain.

Hussin Salamon (2009), menyebutkan Pasaran Modal Islam (PMI) di Malaysia, salah satunya adalah sukuk mempunyai peran dalam pembangunan ekonomi negara di Malaysia. PMI memainkan peranan yang sangat penting dalam sumbangan pembangunan ekonomi di negara Malaysia dengan cara menggerakkan dana modal Islam yang terdapat di pasaran.¹³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia yaitu mendorong pertumbuhan sukuk dari sisi supply dengan mengembangkan sukuk daerah. Sukuk tersebut merupakan alternatif bagi pemerintah daerah yang membutuhkan pendanaan untuk membangun infrastruktur di daerah. Maka dibutuhkan peran sukuk yang sangat berpotensi di Indonesia dalam rangka mendukung upaya pemerintah pusat untuk melakukan pembanguana infrastruktur.¹⁴

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kajian pustaka yaitu dengan menggunakan buku, artikel, internet dan pendapat dari ahli dalam bidang terkait yang sesuai dengan pembahasan. Penelitian ini juga mencari referensi melalui teori yang relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

¹¹ Amri Amrullah dan Friska Yolanda (2018). *Kontribusi Syariah untuk Pembangunan Nasional Digenjot*. Republika. 11 Desember 2018.

¹² Irfan Syauqi Beik (2011). *Memperkuat Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam Al Infaq Vol 2 No 2, Sept 2011. Hlm. 65-72

¹³ Hussin Salamon (2009). *Perkembangan Pasaran Modal Islam dalam Pembangunan Ekonomi Negara*. Jurnal Teknologi 50 (E) pp 1-10. Universiti Teknologi Malaysia.

¹⁴ Road Map IKNB 2015-2019.

4. Kajian Teori

4.1. Pengertian Sukuk

Secara etimologi, sukuk berasal dari kata “Sakk”, yang berarti dokumen atau sertifikat. Sukuk merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak (*plural*). Sakk adalah buku yang mencatat kegiatan transaksi dan laporan yang terjadi. Dalam Kitab *Mu’jam Al Mustholabaat Al Iqtishodiyah Wal Islamiyah*, sakk dapat diartikan sebagai surat berharga (*title deed*).¹⁵

Sukuk menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia didefinisikan sebagai surat berharga jangka penjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau *fee*, serta membayar dana obligasi saat jatuh tempo.¹⁶

Sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak, manfaat dan jasa – jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.¹⁷

Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.¹⁸ Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian sukuk di atas, dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah surat kepemilikan berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan perinsip – prinsip syariah yang mendapatkan imbalan bagi hasil bagi para pemegangnya.

4.2. Karakteristik Sukuk

Sukuk pada dasarnya mirip seperti obligasi konvensional. Perbedaan yang paling mencolok adalah terletak pada konsep bagi hasil/margin, adanya transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa akad perjanjian antara pihak yang disusun berdasarkan prinsip syariah. Pada umumnya, sukuk diterbitkan oleh obligor melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV).²⁰ Adapun karakteristik sukuk menurut Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut;

- a. Sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset atau hak manfaat (*beneficial title*)
- b. Pendapatan berupa imbalan, margin dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan

¹⁵ Ali bin Ali Muhammad (2000). *Mu’jam Al Mustholabaat Al Iqtishodiyah Wal Islamiyah*. Riyadh: Maktabah Al ‘Abikan.

¹⁶ Fatwa DSN MUI No 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang definisi Sukuk.

¹⁷ *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No.17 Tentang *Investment Sukuk* (Sukuk Investasi).

¹⁸ Undang – Undang No.19 Tahun 2008

¹⁹ Bank Syariah Mandiri

²⁰ Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Mengenal Sukuk Instrumen Investasi Berbasis Syariah*.

- c. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir
- d. Memerlukan *undelying asset*
- e. Penggunaan proceed harus sesuai dengan prinsip syariah.

4.3. Jenis – Jenis Sukuk

Ditinjau dari segi aqadnya, sukuk dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI);

1. **Sukuk Ijarah** adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Sukuk Ijarah terdiri dari; sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, sukuk kepemilikan manfaat dan sukuk kepemilikan jasa.
2. **Sukuk Mudharabah** adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal (*rab al-maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*), keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.
3. **Sukuk Salam** adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi milik pemegang sukuk.
4. **Sukuk Musyarakah** adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
5. **Sukuk Istishna'** adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *istishna'* dimana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
6. **Sukuk Murabahah** adalah sukuk yg diterbitkan berdasarkan prinsip jual-beli, penerbit sertifikat sukuk adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut.
7. **Sukuk Wakalah** adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah, dengan menunjuk agen (wakil) tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk.
8. **Sukuk Muzara'ah** adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad muzara'ah, sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
9. **Sukuk MUSAQAH** adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman tersebut berdasarkan akad musaqah, dengan demikian pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan.²¹

²¹ Heri Sudarsono (2008). *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Ditinjau emiten atau institusi yang menerbitkannya, sukuk dapat dibagi menjadi dua macam;²²

1. **Sukuk Korporasi** (*Corporate Sukuk*) adalah sukuk yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan, baik perusahaan swasta maupun BUMN.
2. **Sukuk Negara** (*Sovereign Sukuk*) adalah sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sedangkan ditinjau dari kepemilikan individu, sukuk dapat dibedakan menjadi dua;

1. **Sukuk Ritel** adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia (melalui Kementerian Keuangan RI) dan dijual kepada individu WNI melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri.
2. **Sukuk Tabungan** (penjelasan sama dengan sukuk ritel, hanya beberapa syarat dan ketentuan yang menjadi perbedaan di antara keduanya).

Secara garis besar, perbedaan di antara sukuk ritel dan sukuk tabungan terletak pada jangka waktu dan akad yang digunakan. Sukuk ritel mempunyai jangka waktu 3 tahun, sedangkan sukuk tabungan 2 tahun. Sukuk ritel menggunakan akad *ijarah*, sedangkan sukuk tabungan menggunakan akad *wakalah*.

4.4. Sukuk di Indonesia

Awal mula kehadiran sukuk di Indonesia bisa terbilang terlambat jika dibandingkan dengan negara - negara lain seperti Malaysia, dan beberapa negara di Timur Tengah. Meskipun demikian, perkembangan sukuk di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat signifikan. Sebagai contoh saja, Malaysia. Tahun 1990 sukuk korporasi pertama terbit di Malaysia. Sukuk pertama ini diterbitkan dalam pecahan ringgit (mata uang lokal) dengan nilai RM 125 juta dengan menggunakan akad *Bai' Bithaman Ajil* (BBA). Sukuk Negara pertama pertama kali diterbitkan oleh pemerintah negara Bahrain pada tahun 2001, dengan nilai USD 100 juta dengan akad *Ijarah*.²³

Sukuk pertama di Indonesia terbit pertama kali pada tahun 2002 dalam bentuk sukuk korporasi (*corporate sukuk*), yang diterbitkan oleh PT. Indosat, Tbk dengan nilai mencapai Rp. 175 M dengan menggunakan skema akad sukuk muddharabah. Setelah itu, diikuti oleh beberapa perusahaan lain yang ikut menerbitkan sukuk korporasi.

Sukuk Negara Ritel pertama kali terbit pada awal tahun 2009 dengan diterbitkannya Sukuk Negara Ritel (SR) SR-001 oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada penerbitan perdananya di tahun 2009, agen penjual sukuk ritel (hanya) sebanyak 13 agen yang terdiri dari 14 bank konvensional, 1 bank syariah dan 8 perusahaan sekuritas.²⁴ Seri terakhir adalah SR-011 yang terbit pada Maret 2019. Sukuk Negara Ritel menggunakan skema akad *Ijarah Asset to be Leased*.²⁵

²² Muhammad Iqbal Fasa, *Sukuk: Teori dan Implementasi*, Jurnal Li Falah – Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kendari, Vol.1 No. 1, Juni 2016.Hlm. 86.

²³ Eka Siskawati, *Perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan*, Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol.5 No.2.

²⁴ Nur Kholis (2010). *Sukuk: Instrumen Investasi yang Halal dan Menjanjikan. La_Riba*, Jurnal Ekonomi Islam Vol IV No 2, Desember 2010. Universitas Islam Indonesia.

²⁵ Akad ijarah yang obyek ijarah-nya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.

Tidak hanya Sukuk Negara Ritel, Indonesia telah berinovasi dengan membuat Sukuk Tabungan (ST). Sukuk Tabungan pertama kali diluncurkan pada bulan Agustus 2016 dengan seri ST-001. Pada November 2018 diterbitkan seri yang kedua ST-002. Hingga Februari 2019, Sukuk Tabungan sudah berada pada seri ST-003. Aqad yang dipergunakan dalam Sukuk Tabungan ini adalah aqad *wakalah*.²⁶

Inovasi sukuk di Indonesia sepertinya pantas diapresiasi. Pada Maret 2018, Indonesia juga menjadi negara pertama yang menerbitkan *Sovereign Green Sukuk* (Sukuk Hijau) di dunia senilai USD 1,25 miliar.²⁷ Sukuk Hijau ini nantinya akan dipergunakan ke dalam proyek ramah lingkungan sesuai kerangka hijau negara Indonesia. Penerbitan ini didaulat sebagai sukuk hijau negara pertama di dunia dengan investor yang tersebar di seluruh dunia. Tercatat 32 persen investor berasal dari negara-negara Islam, 25% dari Asia, 15% Uni Eropa, 18 % Amerika Serikat, dan 10% dari Indonesia.²⁸

Kabar yang terbaru adalah bahwa pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua miliar dolar AS untuk melanjutkan komitmen pembiayaan hijau secara berkelanjutan. Penerbitan sukuk wakalah ini terdiri dari dua seri dengan penempatan pada 20 Februari 2019.²⁹ Aqad dalam sukuk ini mempunyai skema aqad *wakalah* seperti Sukuk Tabungan.

Setelah sepuluh tahun penerbitan sukuk, akhirnya Indonesia dinobatkan sebagai negara terbesar yang menerbitkan sukuk di pasar internasional selama satu dekade. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyatakan selama sepuluh tahun, total penerbitan sukuk negara di pasar internasional telah mencapai USD16,15 miliar.³⁰

4.5. Keuntungan Investasi Sukuk

Beberapa keuntungan investasi sukuk antara lain,³¹

- a. Aman: Investasi dijamin 100% oleh negara
- b. Terjangkau: mulai dari nominal Rp. 1 Juta sudah dapat berinvestasi
- c. Jangka Waktu: 3 tahun, dapat dijual sebelum jatuh tempo
- d. Halal: Dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI
- e. Menguntungkan: Kupon/imbalan tetap dibayar setiap bulan

²⁶ Aqad dimana penerbit sukuk wajib menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai Wali Amanat/Wakil dari pemegang sukuk untuk mengelola dana hasil penerbitan sukuk dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan.

²⁷ Mila Chitra Dinisari. *Indonesia Jadi Penerbit Sukuk Negara Terbesar di Dunia* (Bisnis Indonesia, 7 November 2018).

²⁸ Adinda Pryanka dan Nidia Zuraya. *Dana Sukuk Hijau Pertama RI untuk Proyek Ramah Lingkungan*. (Republika, 11 Desember 2018).

²⁹ Friska Yolanda. *Pemerintah Terbitkan Sukuk Wakalah Global 2 Miliar Dollar AS*. (Republika, 14 Februari 2019).

³⁰ Ade Hapsari Lesatarini, *Indonesia Jadi Penerbit Sukuk Negara Terbesar di Dunia* (<https://www.medcom.id/ekonomi/makro/4ba2X9Jk-indonesia-jadi-penerbit-sukuk-terbesar-di-dunia>, diakses pada 5 April 2019)

³¹ Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI 2019

- f. Ikut berpartisipasi membangun negara: dana sukuk digunakan dalam kegiatan pembangunan proyek negara.

Tabel 3. Perbandingan Sukuk Ritel dengan Jenis Invesatasi Lain

	Sukuk Ritel	ORI	Saham	Reksadana	Deposito
Return/imbalan	Imbalan setiap bulan	Kupon setiap bulan	Deviden	Kenaikan Nilai Aktiva Bersih	Bunga
Pasar sekunder dan potensi capital gain	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada
Jatuh tempo	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
Jaminan pemerintah	Ada (100%)	Ada (100%)	Tidak ada	Tidak ada	Ada (max Rp.2 M)
Pajak imbalan	15% final	15% final	10% final	Khusus untuk investasi reksadana pada obligasi /sukuk dikenakan pajak final 5%	20% final

Sumber: Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI 2019

4.7. Tujuan Penerbitan Sukuk

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam pasal 4 disebutkan bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek.

Dari uraian undang – undang tersebut, sudah jelas bahwa pemerintah menerbitkan sukuk tidak lain bertujuan untuk membiayai pembangunan proyek, termasuk pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah dilakukan oleh negara.

4.8. Pembangunan Infrastruktur

Definisi infrastruktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana umum dapat meliputi fasilitas publik seperti jalan raya, sekolah, jembatan, pelabuhan, bandara dan lain sebagainya.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam mendukung pembangunan perekonomian suatu negara. Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat lepas dari pengaruh pembangunan infrastruktur. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat. Infrastruktur berperan penting dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi.³²

Terlepas dari pro dan kontra masyarakat dalam menyikapi pembangunan infrastruktur, setidaknya masyarakat dapat menyikapinya secara bijaksana. Dengan pembangunan infrastruktur, bukan hanya negara yang akan diuntungkan melainkan juga akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa manfaat dengan adanya pembangunan infrastruktur diantaranya; (i) terciptanya lapangan pekerjaan yang luas, hal ini dikarenakan dengan infrastruktur yang layak akan mengundang para investor untuk berinvestasi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan, (ii) dapat membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya hanya terpusat di wilayah tertentu, (iii) meratakan pembangunan sehingga terciptanya keadilan.

Infrastruktur dalam konteks ekonomi sebagai sebuah terminologi yang memayungi banyak aktivitas terkait “*social overhead capital*”. Selain itu, “*social overhead capital*” bisa dikatakan sebagai fondasi bagi peningkatan standar kehidupan, penggunaan lahan nasional secara lebih baik dan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi.³³

Infrastruktur dapat dibedakan menjadi tiga, diantaranya;

1. Infrastruktur keras (jalan raya, pelabuhan, bandara, jalan kereta api)
2. Infrastruktur keras non fisik (ketersediaan air bersih, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, minyak bumi, gas)
3. Infrastruktur lunak (kualitas pelayanan umum, etos kerja, norma).³⁴

5. Sukuk dan Pembangunan Negara

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan pemerintah menerbitkan sukuk adalah untuk membiayai pembangunan proyek. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI telah menerbitkan Sukuk Negara pertama kali pada awal tahun 2009. Lebih dari 10 tahun, sukuk berperan penting dalam membantu pembangunan proyek negara. Berbagai pembangunan proyek telah dijalankan dengan pendanaan dari sukuk. Hingga kini, penerbitan sukuk masih dilakukan oleh pemerintah. Sukuk Negara seri terakhir (SR-011) telah terbit pada 28 Maret 2019.³⁵ Tidak jauh berbeda dengan penerbitan sukuk – sukuk sebelumnya, sukuk seri SR-011 dipergunakan untuk proyek APBN 2019 dan Barang Milik Negara. Adapun rincian perolehan dari penerbitan Sukuk Negara dari seri SR-001 hingga SR -011 sebagai berikut;

³² World Bank. World Development Report: *Infrastructure for Development*, Oxford University Press, New York, 1994.

³³ World Bank dalam Baiti Nur Fadian. *Analisis Peran Sukuk Bagi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. 2016.Hlm.542.

³⁴ Wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur#Jenis_Infrastruktur, diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 10:47 WIB).

³⁵ Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia: *Sukuk Negara Ritel seri SR 011: Investasi Rakyat Penuh Manfaat*, 2019

Tabel 4. Perkembangan Nominal Sukuk SR 01 – SR-011

Sukuk	Terbit / Jatuh Tempo	Coupon Rate	Nominal (Triliun)
SR- 001	25 Feb 2009 / 25 Feb 2012	12 %	Rp. 5.556.290
SR- 002	10 Feb 2010 / 10 Feb 2013	8,70 %	Rp. 8.033.860
SR- 003	23 Feb 2013 / 23 Feb 2014	8,15 %	Rp. 7.341.410
SR- 004	21 Mar 2012 / 21 Sep 2015	6,25 %	Rp. 13.613.805
SR- 005	27 Feb 2013 / 27 Feb 2016	6,00 %	Rp. 14.968.875
SR- 006	05 Mar 2014 / 05 Mar 2017	8,75 %	Rp. 19.323.345
SR- 007	11 Mar 2015 / 11 Mar 2018	8,25 %	Rp. 21.965.035
SR- 008	10 Mar 2016 / 10 Mar 2019	8,30 %	Rp. 31.500.000
SR- 009	22 Mar 2017 / 10 Mar 2020	6,90 %	Rp. 14.037.310
SR- 010	21 Mar 2018 / 10 Mar 2021	5,90 %	Rp. 8.436.570
SR- 011	28 Mar 2019 / 10 Mar 2022	8,05 %	Rp. 21.117.570

Sumber: Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahun sejak 2009 hingga Maret 2019, pemerintah selalu menerbitkan sukuk. Dari tabel tersebut dapat diketahui juga bahwa hasil penjualan SR-008 merupakan yang terbesar di antara yang lainnya. SR-008 merupakan penerbitan Sukuk Negara Ritel terbesar sejak Sukuk Negara Ritel pertama kali diterbitkan pada tahun 2009. Besarnya minat beli investor tersebut antara lain disebabkan oleh semakin baiknya pemahaman masyarakat mengenai instrumen investasi Sukuk Negara Ritel dan semakin berpengalaman serta inovatifnya agen penjual dalam memasarkan Sukuk Negara Ritel.³⁶

Hasil penjualan SR-009 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan kupon yang ditawarkan dalam SR-009 yang rendah jauh dari ekspektasi pasar. Pemerintah hanya menawarkan kupon 6,9% dibandingkan SR- 008 yang mempunyai kupon sebesar 8,30%. Rendahnya kupon ini membuat daya saing sukuk ritel SR-009 lemah daripada instrumen pendapatan tetap lain.³⁷ Hasil penjualan SR-010 juga mengalami penurunan, bahkan lebih rendah daripada sebelumnya, karena kupon yang ditawarkan lebih rendah, yaitu sebesar 5,90%.

Hasil dari penjualan sukuk SR-011 mengalami kenaikan, walaupun belum dapat mengalahkan penjualan SR-008. Tingginya nilai penjualan SR- 011 sangat dipengaruhi oleh tingkat kupon tetap sebesar 8,05%. Nilai kupon tersebut dinilai masih cukup menarik bagi

³⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Keterangan Pers Hasil Penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-008*, Jakarta, 7 Maret 2016.

³⁷ Beben Feri Wibowo (Senior Research Analyst Pasar Dana), *Sukuk Ritel 009 Kurang Diminati Pembeli*, Kontan, 21 Maret 2017.

investor ketimbang deposito di perbankan.³⁸ Hasil penjualan SR-011 akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek APBN tahun 2019 dan Barang Milik Negara. Proyek APBN 2019 dapat meliputi pembangunan infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penjualan sukuk SR-011, pemerintah telah menunjuk agen penjual resmi yang berjumlah 22 agen penjual. Adapun agen – agen penjual sukuk SR- 011 terdiri dari 20 bank (17 bank konvensional, 3 bank syariah) dan 2 perusahaan sekuritas. Adapun bank – bank yang menjadi agen penjual sukuk SR-011 adalah; BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, BCA, Bank Danamon Indonesia, Bank Panin, Bank DBS Indonesia, Bank HSBC Indonesia, Bank Mega, Bank Permata, Bank OCBC NISP, CIMB Niaga. Citibank N.A Indonesia, Standard Chartered Bank, Maybank Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan agen penjual dari perusahaan sekuritas adalah; Bahana Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia.

Pemerintah di dalam penjualan sukuk SR-011 diwakili Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengumumkan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 melalui siaran pers sebagai berikut;

Tabel 5. Hasil Penjualan Sukuk SR-011

1. Nominal Penerbitan	Rp. 21.117.570.000.000,00
2. Tingkat Imbalan/Kupon	Tetap, sebesar 8,05% per tahun
3. Tanggal Penerbitan/Setelmen	28 Maret 2019
4. Tanggal Jatuh Tempo	10 Maret 2022
5. Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon	Setiap tanggal 10 setiap bulannya. Dalam hal tanggal pembayaran imbalan/kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran imbalan/kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
6. Pembayaran Imbalan/Kupon Pertama Kali	10 Mei 2019
7. Bentuk dan Karakteristik Sukuk Negara	Tanpa warkat,dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable) setelah dua periode imbalan (sejak tanggal 11 Juni 2019) dan hanya dapat diperdagangkan antar investor domestik.
8. Aqad	<i>Ijarah Asset to be Leased</i>
9. <i>Underlying Asset</i>	Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN Tahun 2019

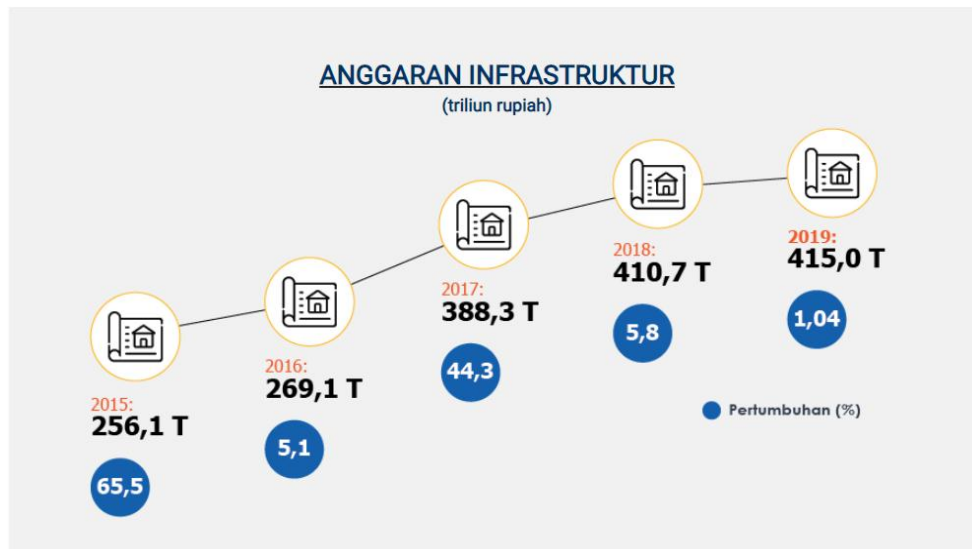
Sumber: Siaran Pers Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu RI, 26 Maret 2019

³⁸ Eric Sutedja (Head of Fixed Income Fund Manager Prospera Asset Management), *Ini Penyebab Sukuk Ritel SR- 011 Dapat terjual Lebih Dari Dua Kali Lipat Target Awal*, Kontan, 26 Maret 2019

Pembangunan merupakan wujud tindak lanjut dari pemerintah secara berkesinambungan dari pemanfaatan dana sukuk seperti tahun – tahun sebelumnya. Hal ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setiap tahunnya, pemerintah merancang anggaran pembelanjaan negara untuk masa satu tahun berjalan. Anggaran yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya mengandalkan dari pendapatan negara saja, tetapi juga melalui dana yang diperoleh dari penjualan obligasi dan sukuk.

Draft APBN 2019 tentang anggaran dan belanja negara, pemerintah menganggarkan dalam beberapa bidang. Salah satu anggaran dalam isi APBN 2019 adalah anggaran tentang infrastruktur. Anggaran APBN tentang alokasi infrastruktur dapat dilihat sebagai berikut;

Gambar 1. Anggaran Infrastruktur



Sumber: Anggaran Infrastruktur, APBN 2019, Kementerian Keuangan RI.³⁹

Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa anggaran infrastruktur sejak tahun 2015 sampai 2019 terus mengalami kenaikan. Anggaran infrastruktur tahun 2019 mencapai 415 T. Hal ini disebabkan ada beberapa proyek dari pemerintah yang akan terus dibangun dan beberapa proyek yang masih dalam tahap penyelesaian. Sasaran target dalam anggaran infrastruktur APBN 2019 ini meliputi;

1. Pembangunan/rekonstruksi/pelebaran jalan sepanjang 2.007 km
2. Pembangunan Bandara baru sejumlah 4 unit
3. Pembangunan jaringan irigasi (162 ribu hektar)
4. Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (27.067 m)
5. Pembangunan/penyelesaian rel kereta api (415, 2 km)
6. Bendungan (48 unit).

³⁹ Anggaran Infrastruktur, APBN 2019, Kementerian Keuangan RI

Adapun peran sukuk sebagai Surat Berharga Syariah Negara, mempunyai peran yang sangat penting di dalam kontribusi pembangunan negara yang berkelanjutan. Peran sukuk dalam APBN tidak dapat dilepaskan, karena sudah sangat jelas disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN bahwa sukuk mempunyai kontribusi dalam pembangunan proyek negara. Peran sukuk dalam negara antara lain;⁴⁰

1. Menyediakan alternatif sumber pembiayaan APBN
2. Menyediakan instrumen investasi dan likuiditas berbasis syariah
3. Mengembangkan pasar keuangan syariah
4. Menyediakan banchmark bagi penerbitan sukuk korporasi.

Sukuk merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam kontribusi penyusunan APBN. Beberapa contoh bentuk kontribusi Sukuk Negara dalam pembiayaan APBN adalah sebagai berikut;⁴¹

- a. Akumulasi penerbitan SBSN sampai dengan 27 Februari 2019 mencapai Rp. 1.044,71 T
- b. Akumulasi *Project Financing Sukuk* 2013 – 2019 mencapai Rp. 90,79 T (meliputi; (i) Rel, stasiun,fasilitas KA di Sumatra, Jawa, Sulawesi: Rp. 24,62 T, (ii) Jalan dan jembatan se Indonesia: Rp. 25,67 T, (iii) Drainase, bendungan, pengendali banjir, penyedia air se Indonesia: Rp. 8,01 T, (iv) Sarana pendidikan & pelayanan umum: Rp. 6,88 T, (v) Pembangunan ITERA tahun I: Rp. 129,63 M)
- c. Porsi SBSN terhadap SBN sebesar 19%, meningkat terus sejak 2008
- d. *Outstanding* SBSN per 27 Februari 2019 mencapai Rp. 696, 82 T

Selama satu dekade, SBSN telah menjadi instrumen pembiayaan dan investasi serta berperan dalam; sumber pembiayaan APBN, memperluas basis investor, mengembangkan pasar keuangan syariah, menyediakan instrumen investasi dan likuiditas berbasis syariah.

Adapun beberapa contoh kontribusi nyata dari sukuk dalam pembangunan infrastruktur negara adalah sebagai berikut;⁴²

- a) Pembangunan Underpass Simpang Mandai Makassar (Sukuk Negara 2015 – 2017)
- b) Pembangunan Ramp on/off Flyover Amplas Medan (Sukuk Negara 2016)
- c) Pembangunan Jalan Gerung Mataram-NTB (Sukuk Negara 2015)
- d) Pembangunan Jembatan Petuk Kupang-NTT (Sukuk Negara 2015-2017)
- e) Pembangunan Jembatan Pulau Balang Samarinda-Kalimantan Timur (Sukuk Negara 2015-2018)
- f) Pembangunan Jalur Kereta Double Track Cirebon-Kroya (Sukuk Negara 2013-2014).

⁴⁰ Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI, *Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*, 2017, hlm. 11

⁴¹ Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, *Sukuk Negara Ritel seri SR-011, Investasi Rakyat Penuh Manfaat*, 2019, 4.

⁴² Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, *Sukuk Negara Ritel seri SR-011, Investasi Rakyat Penuh Manfaat*, hlm. 5.

Selain yang disebutkan di atas, tentunya masih banyak lagi peran sukuk dalam pembangunan infrastruktur negara yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Sejak tahun 2008, pemerintah telah berupaya mendorong perkembangan keuangan syariah melalui penerbitan SBSN. Selama satu dekade SBSN telah menjadi instrumen pembiayaan dan investasi syariah yang penting, serta turut berperan langsung dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.

6. Penutup

Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi berbasis syariah yang sudah di kenal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI mengeluarkan sukuk pertama kali yang di jual kepada individu WNI pada tahun 2009 dengan nama Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel) SR-001. Sampai Maret 2019, pemerintah telah mengeluarkan seri sukuk SR-011. Sukuk merupakan salah satu komponen penting dalam APBN untuk membiayai pembagunan proyek negara. Karena sukuk memegang prinsip syariah, maka penggunaan dana sukuk melarang penggunaan dana ke arah yang mempunyai sifat haram yang dilarang dalam Islam.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan harus merata ke seluruh pelosok Indonesia. Pembangunan sarana infrastruktur merupakan suatu kewajiban bagi negara yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat agr tidak terjadi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Sukuk mempunyai peran penting dalam membantu pembangunan negara. Akumulasi penerbitan SBSN sampai dengan 27 Februari 2019 mencapai Rp. 1.044,71 T, sedangkan akumulasi *Project Financing Sukuk* 2013 – 2019 mencapai Rp. 90,79 T. Dana – dana dari sukuk tersebut sudah digelontorkan pemerintah ke dalam berbagai proyek pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah terus mengupayakan dalam meningkatkan perkembangan keuangan syariah di Indoenesia. Sukuk sebagai salah satu instrumen keuangan syariah sudah terbukti memiliki andil yang besar dalam membantu proses pembangunan negara. Selama lebih dari sepuluh tahun sukuk hadir di tengah – tengah masyarakat Indonesia, menunjukkan progres yang signifikan dengan ditandai banyak minat dari masyarakat untuk berinvestasi ke dalam keuangan syariah. Investasi sukuk dari masyarakat digunakan untuk membangun proyek pembangunan negara, sehingga secara langsung masyarakat ikut andil dalam partisipasi pembangunan Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali bin Ali Muhammad (2000). *Mu'jam Al Mustholahaat Al Iqtishodiyah Wal Islamiyah*. Riyadh: Maktabah Al 'Abikan.
- Ayub, Muhammad (2007) . *Understanding Islamic Finance*. London: Wiley
- Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia: *Sukuk Negara Ritel seri SR 011: Investasi Rakyat Penuh Manfaat*, 2019.
- Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,

Kementerian Keuangan RI, *Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*, 2017, hal 11.

_____, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang, Kementerian

Kuangan Republik Indonesia. *Mengenal Sukuk Instrumen Investasi Berbasis Syariah*

Shahnamugan dan Zahari (2009). *A Primer on Islamic Finance*. Malaysia: IBFIM

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No.17
Tentang *Investment Sukuk* (Sukuk Investasi).

_____, Kementerian Keuangan RI, *Sukuk Negara Ritel seri SR-011, Investasi Rakyat Penuh Manfaat*, 2019, hal 4.

_____, Kementerian Keuangan RI, *Sukuk Negara Ritel seri SR-011, Investasi Rakyat Penuh Manfaat*, 2019, hal 5.

Undang – Undang No.19 Tahun 2008

World Development Report: *Infrastructure for Development*, Oxford University Press, New York, 1994.

Jurnal

Beik, Irfan Syauqi (2011). Memperkuat Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al Infaq Vol 2 No 2*, Sept 2011 pp 65-72.

Fasa, Muhammad Iqbal (2016) *Sukuk: Teori dan Implementasi*, *Jurnal Li Falah – Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, IAIN Kendari, Vol.1 No. 1, Juni 2016, Hal 86.

Kholis, Nur (2010). Sukuk: Instrumen Investasi yang Halal dan Menjanjikan. *La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam Vol IV No 2*, Desember 2010. Universitas Islam Indonesia.

Salamon, Hussin (2009). Perkembangan Pasaran Modal Islam dalam Pembangunan Ekonomi Negara. *Jurnal Teknologi 50 (E) pp 1-10*. Universiti Teknologi Malaysia.

Siskawati, Eka *Perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan*, *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol.5 No.2.

World Bank dalam Baiti Nur Fadian. *Analisis Peran Sukuk Bagi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. 2016, hal 542.

World Bank dalam Muryaningsih, Novi dkk (2014). *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Peneliti ekonomi di BRE DKM, Bank Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol 17 No 1.

Website

Ade Hapsari L, *Indonesia Jadi Penerbit Sukuk Negara Terbesar di Dunia*

(<https://www.medcom.id/ekonomi/makro/4ba2X9Jk-indonesia-jadi-penerbitsukukterbesar-di-dunia>), diakses pada 5 April 2019.

- Adinda Pryanka dan Nidia Zuraya. *Dana Sukuk Hijau Pertama RI untuk Proyek Ramah Lingkungan*. (Republika, 11 Desember 2018).
- Amri Amrullah dan Friska Yolanda (2018). *Kontribusi Syariah untuk Pembangunan Nasional Digenjot*. Republika. 11 Desember 2018.
- APBN 2019, Anggaran Infrastruktur, Kementerian Keuangan RI. Bank Syariah Mandiri
- Beben Feri Wibowo (Senior Research Analyst Pasar Dana), *Sukuk Ritel 009 Kurang Diminati Pembeli*, Kontan, 21 Maret 2017.
- Dahlan Slamet (2011). *Percepat Pembangunan Infrastruktur, Kemenkeu Terbitkan Sukuk Proyek*. PHEI. Diakses pada 3 April 2019.
- Eric Sutedja (Head of Fixed Income Fund Manager Prospera Asset Management), *Ini Penyebab Sukuk Ritel SR- 011 Dapat terjual Lebih Dari Dua Kali Lipat Target Awal*, Kontan, 26 Maret 2019.
- Fatwa DSN MUI No 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang definisi Sukuk.
- Flora Librayanti (2018), *Kemenkeu Ungkap Manfaat Penting Sukuk negara bagi Pembangunan Infrastruktur*. Gatra. 23 November 2018.
- Friska Yolanda. *Pemerintah Terbitkan Sukuk Wakalah Global 2 Miliar Dollar AS*. (Republika, 14 Februari 2019).
- Heri Sudarsono (2008). *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/07/235125126/meningkat-kontribusi-sukuk-negara-untuk-pembiayaan-apbn>, diakses pada 3 April 2019 pukul 14:06 .
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019). *Mengenal Sukuk Ritel*. Diakses pada 3 April 2019.
- _____, *Keterangan Pers Hasil Penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-008*, Jakarta, 7 Maret 2016.
- Mila Chitra Dinisari. *Indonesia Jadi Penerbit Sukuk Negara Terbesar di Dunia* (Bisnis Indonesia, 7 November 2018).
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia 2017 2019*. Diakses pada 3 April 2019.
- Rifki Ismail dan Khairunniasa Musari (2009). *Menggagas Sukuk Sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter*. Bisnis Indonesia. 1 April 2009.
- Wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur#Jenis_Infrastruktur, diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 10:47 WIB).
- World Economic Forum (WEF). <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report2018/competitiveness-rankings/#series=GCI4.A.02>